

TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL

Suddin Bani

Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

***Abstract:** Efforts to promote education should ideally be realized jointly between the government, community, business world in improving education institutions to set up a more skilled labor force, and so forth. Such efforts must be done comprehensively started the primary level up to tertiary education. One of them the government should do is to make improvements in the areas of curriculum. Government in order to homogenize step in revamping the education issue has redefined the concept of the curriculum is a set of plans and arrangements regarding the objectives, content and learning materials, as well as the means used to guide the implementation of learning activities to achieve specific educational objectives.*

***Keywords:** Institute of Education, Global Competition.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berupaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Dan salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah untuk ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain adalah bidang pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan reformasi dibidang pendidikan, upaya reformasi pemerintah di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Hasan Basri: (2012), Ada tiga hal yang cukup signifikan perbedaan antara Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dan undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air yaitu:

1. Sisdiknas No. 20/2003 bersifat sentralistik –Sisdiknas No. 2/1989 bersifat desentralisasi
2. Pada sisdiknas No. 20/2003 pemerintah pusat /daerah bertanggung jawab pada pelayanan,/ dana, rambu-rambu nasional dan standar mutu nasional, sedangkan masyarakat bertanggung jawab pada unit pendidikan (sekolah-madrasah dan mutu pendidikan .Adapun Sisdiknas No. 2/1989 tidak

demikian.

3. Sisdiknas No. 20/2003 lebih demokratis, terbuka, memberikan otonomi dan tanggung jawab pada masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu¹.

Selain perbedaan juga terdapat persamaan menurut Hasan Basri yaitu:

1. Keduanya masih menempatkan pendidikan sebagai kerja “nonakademik”
2. Pendidikan diselenggarakan di bawah otoritas kekuasaan administrasi-birokratis dan belum menempatkan pendidikan sebagai kerja “akademik”
3. Penyelenggaraan di bawah otoritas keilmuan kerja nonakademik: loyalitas, “*yudical hierarchy*” eselonisasi, dan senioritas didasarkan masa kerja dan kepatuhan.
4. Kerja akademik reputasi akademik, bersaing dalam kreativitas dan inovasi, tidak mengenal “*yudical hierarchy*”, hanya mengenal perbedaan bobot mutu akademik, dan tidak mengenal eselonisasi.

Apa yang dikemukakan di atas terutama pada hal yang berbeda menunjukkan bahwa pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan untuk memperbaiki mutu pendidikan di tanah air. Kalau tadinya pada Sisdiknas tahun 1989 mengarah ke desentralisasi, maka pada tahun 2003 pemerintah kembali melakukan sentralisasi pendidikan sebagaimana sebelum tahun 1989. Itu artinya pemerintah betul-betul ingin mengontrol mutu pendidikan, sebab pada masa OTODA tertentu sistem pengelolaan dunia pendidikan termasuk dalam pengangkatan tenaga pengajar seakan lepas dari sistem yang pada saat itu pemberlakukan desentralisasi sangat kuat, karena kewenangan banyak diberikan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah tingkat II, sehingga control terhadap penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah begitu bebas, termasuk pengangkatan tenaga pengajar merupakan kewenangan pemerintah daerah tingkat II yang disebutkan sebelumnya.

Dengan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, budaya, suku, agama dan adat istiadat tidaklah mudah untuk mengelolanya terutama dalam bidang pendidikan. Sudarwan Danim: (2006) mengemukakan beberapa kelemahan mendasar pendidikan kita antara lain:

Pertama, bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, kelemahan tersebut meliputi dua yaitu dimensi proses dan substantif. Pada tataran proses seperti: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menurut belum dilakukan secara ketat. Sedangkan dalam tataran substantif seperti personalia, keuangan, sarana dan prasarana, instrument pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan dan lain sebagainya.

¹ Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.84

Kedua, masalah pendanaan. Komitmen pemerintah Indonesia mengalokasikan dana pendidikan dinilai belum memadai oleh masyarakat. Telah muncul tuntutan dari berbagai pihak seperti ilmuan, praktisi pendidikan, eksekutif, pimpinan partai politik, politisi untuk mengdongkrak anggaran 20%. demikian pula dana-dana pendidikan dari yang bersumber dari masyarakat, umumnya dijadikan sebagai dana penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ketiga, masalah cultural. Masalah cultural yang dimaksud Sudarwan Danim adalah bermakna reformasi pendidikan akan sangat ditentukan oleh masyarakat pendidikan yang ada di lembaga itu.

Keempat, faktor geografis. Terutama bagi perguruan tinggi di luar Jawa, faktor ini menjadi kendala dilihat dari aspek mobilitas tenaga edukatif, kecenderungan memilih program oleh mahasiswa, kerjasama kelembagaan kedekatan dengan sumber informasi, jaringan teknologi informasi dan sebagainya. Faktor geografis ini pula menyulitkan menyusun kebijakan pendidikan yang bermutu, karena peserta didik menyebar mulai dari kota metropolitan hingga ke Lembah Baliem di Irian atau suku Kubu di Jambi demikian Sudarwan Danim.

Apa yang digambarkan oleh Sudarwan di atas merupakan kondisi objektif pendidikan di tanah air dan untuk mengatasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika para pakar pendidikan di Jakarta berkumpul dari berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan/mendiskusikan konsep – konsep ideal untuk pembangunan di bidang pendidikan di tanah air, boleh jadi apa yang dirumuskan di Jakarta sebagai ibukota Negara terkadang tidak bisa dan tidak dicocok untuk diterapkan didaerah lain di Indonesia terutama daerah tertentu Papua (pedalaman), Sumatra pedalaman, Kalimantan Pedalaman dengan berbagai macam suka dan adat istiadat masyarakat, demikian pula karakter masyarakat yang sebagian masih terikat adat istiadat: seperti suku/adat Kajang di Bulukumba, suku Badui di Jawa Barat, dan berbagai macam suku yang ada di Papua, dan Sumatra bahkan sebagian suku masih mempertahankan cara berpakaian –seperti koteka di sebagian daerah di Papua dan baju serba hitam di daerah Kajang di Bulukumba - ketidaksiapan menerima kemajuan teknologi yang di satu sisi dan keinginan mempertahankan budaya lokal di sisi lain. Belum lagi daerah daerah tertentu seperti Maluku dengan kepulauan yang begitu luas dan berjauhan dan tentunya tidak terlupakan wilayah sekitar Nusatenggara yang begitu tandus. Itulah beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam merencanakan strategi penyempurnaan sistem pendidikan di tanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya kendala dan tantangan dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan sekaligus kendala untuk mengevaluasinya dalam

berbagai aspek yang dikemukakan di atas.

II. PEMBAHASAN

Indonesia dengan jumlah penduduk dan berbagai macam suku dan adat yang istiadat serta agama dan kepercayaan, wilayah yang sangat luas yang tersebar di beberapa pulau dinatarai oleh lautan, bahkan merupakan penduduk terbesar dan wilayah terbesar di Asia tenggara, tentu menjadi pangsa pasar yang sangat besar dan potensil pula bagi Negara produser-produser alat-alat elektronik dan makanan dari Negara industri baik Negara-negara ASEAN maupun dari Negara-negara Eropah dan Amerika, demikian pula dalam bidang pasar kerja.

Kemajuan dalam berbagai bidang dan kemudahan dalam dunia komunikasi serta globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bias ditawarkan lagi oleh Negara apapun, oleh karena itu salah satu upaya untuk mengatasi kemajuan tersebut adalah kesiapan setiap Negara untuk mengantisipasinya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh setiap Negara, termasuk Indonesia adalah dengan mengatasi keterbelakangan dalam dunia pendidikan.

Kondisi seperti yang digambarkan diatas merupakan peluang dan tantangan bagi setiap Negara. Indonesia sebagai bagian dari percaturan tersebut kondisi ini bisa menjadi peluang yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar, namun dapat juga menjadi tantangan apabila Negara tidak segera mengantisipasi kondisi tersebut.

Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkualitas, maka tentunya dibutuhkan reformasi dan reformulasi sistem pendidikan nasional. Perlu ada paradigma baru dalam bidang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dari Negara-negara lain.

H.A.R. Tilaar (2006) mengatakan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional mestinya telah disiapkan *grand design* pembangunan pendidikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Dari apa yang dikemukakan oleh Tilaar perlu menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan karena Negara sudah mengalokasikan dana yang cukup besar di bidang pendidikan yaitu 20 % dari APBN. Yang menjadi tanda Tanya adalah apakah dana sebesar itu sudah tersalurkan dengan baik dan mencapai sasaran, barangkali itu yang dimaksud oleh Tilaar *grand design* sangat penting untuk pembangunan jangka panjang dalam bidang pendidikan. Sebab jangan sampai dengan dana sebesar itu Negara sudah siapakan tetapi sasarannya belum maksimal untuk mengantisipasi persaingan global yang semakin tak terhindarkan oleh Negara manapun termasuk Indonesia.

Di tengah pesatnya kemajuan pada hampir semua aspek dan kencangnya

globalisasi, maka Indonesia harus siap menerima kenyataan ini sebagai konsekwensi menjadi bagian penduduk dunia. Mengemukakan Sedangkan sisten sentralisasi yang diatur pada undang-undang tahun 2003 dimaksudkan agar kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan lebih terarah, namun pelibatan masyarakat lebih dioptimalkan untuk mendukung terlaksananya pendidikan di daerah. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan undang-undang tersebut sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menghadapi persaingan bebas berupa bursa kerja antar negara, serta untuk menghadapi kemajuan dan persaingan global dengan bangsa-bangsa lain khususnya di kawasan ASEAN.

Dengan kondisi bangsa sekarang ini, maka pemerintah melakukan beberapa perubahan sebagai agenda reformasi dalam bidang pendidikan Fasli Jalal (Editor) (2001) dalam Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah mengemukakan beberapa agenda perubahan untuk reformasi dalam pendidikan antara lain:

Pertama, Desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar, orientasi kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerahjuga dilaksanakan pada sektor pendidikan. Dengan demikian pemerintah menghendaki agar sektor pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang akan dilimpahkan pengelolaannya secara desentralisasi terutama pada daerah tingkat II. Upaya desentralisasi pemerintahan ke tingkat II didasarkan pada PP No. 8 Tahun 1995 yang mengatur penyerahan sebahagian urusan pemerintahan yang dititik beratkan pada daerah tingkat II.

Kedua, pendidikan berbasis masyarakat, pemerintah menyadari bahwa terdapat keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan, salah satu untuk mengatasi kondisi tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat adalah bentuk pelibatan masyarakat secara luas baik tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ swasta agar terlibat dalam usaha pembangunan dunia pendidikan. Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut, maka pada setiap satuan pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai SLTA dibentuk komite sekolah yang di dalamnya terdapat berbagai unsur seperti kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, orang tua peserta didik, guru dan lain sebagainya, unsure-unsur inilah sebagai motivator dalam pengembangan

Zainuddin (2008) mengatakan bahwa para pengelola pendidikan memiliki tugas antara lain: pertama, bagaimana dengan sumber pembiayaan pendidikan yang ada dapat melakukan suatu sistem pendidikan yang efisien. Kedua, pengelola pendidikan dihadapan pada usaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan sumber pembiayaan lainnya agar kinerja sekolah dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian pelibatan berbagai

unsur untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah suatu keharusan agar masyarakat merasa memiliki lembaga pendidikan yang ada di sekitar mereka.

Ketiga, Manajemen Berbasis Sekolah, salah satu aspek yang perlu dilakukan reformasi dalam bidang pendidikan adalah perlunya pembenahan lembaga-lembaga pendidikan dari aspek manajemen. Sebagai implikasi dari otonomi daerah, maka pengelolaah sekolah juga membutuhkan otonomi dan salah upaya dalam aspek tersebut adalah pembenahan sekolah dari aspek manajemen. Fasli Jalal (ed.) (2001) menawarkan beberapa strategis untuk membenahi manajemen sekolah yaitu: a). kurikulum yang berbasis inklusif, b). proses belajar mengajar yang efektif, c). lingkungan sekolah yang mendukung, d). sumber daya yang berasas pemerataan, dan e), standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Menurut Fasli Jalal kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah yaitu: 1). Manajemen/organisasi/kepemimpinan, 2) proses belajar mengajar, 3), sumber daya manusia, dan 4). Administrasi sekolah

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah upaya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mandiri dalam melakukan pengelolaan setiap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kaulitas satuan pendidikan dari berbagai aspek, yang oleh Nanang Fattah (2004) bahwa dengan manajemen berbasis sekolah ini sebagai bentuk pengalihan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan kepada setiap yang berkepentingan.

Upaya pemberian kewenangan yang lebih luas dalam manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu reformasi dalam bidang pendidikan yang oleh Nanang Fattah (2004) menyebutnya sebagai sesuatu yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi di sector pendidikan yang meliputi perihak kekuasaan (*Power*), yang perlu memperhatikan tiga unsur yaitu: (1) kewajiban/*responsibility*, (2) wewenang/*authority*, (3) Pertanggungjawaban/*accountability*. Nanang Fattah menambahkan bahwa bebrbagi kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sekolah memerlukan penataan secara hati-hati, dan dilaksanakan secara rapih yang dilandasi semangat kerjasama yang mantap dan konsisten dalam kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing.

Keempat, restrukturisasi sistem karier dan intensif guru, Donni Juni Priansa (2014) dalam Kinerja dan Profesionalisme Guru mengatakan bahwa guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada

tingkat institusional dan instruksional. Dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menempatkan guru sebagai tenaga profesional.

Ada empat hal yang selalu dikaitkan dengan profesionalisme guru yaitu berkaitan dengan profesionalisme guru kaulifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Guru sebagai motivator harus memiliki empat kompetensi yaitu: pedagogic, professional, kepribadian, dan social, keempat kompetensi ini merupakan hal mutlak yang harus dimiliki seorang guru profesional agar dapat melayani kebutuhan peserta didik dengan baik dan berkomunikasi semua stakeholder pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan istilah sertifikasi bagi guru sebagai persyaratan mendapatkan tunjangan profesi dengan mewajibkan guru untuk mengikuti PLPG. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini merasa dipandang sebelah mata, sementara tugas yang diembannya sangat berat, sebab mereka adalah penentu masa depan bangsa di tangan mereka nasib generasi muda untuk melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkarakter serta beriman.

Apa yang diuraikan di atas merupakan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, manajemen, sumber daya manusia agar para lulusan lembaga pendidikan nantinya dapat berkompetesi dalam persaingan global, apabila pasca ditetapkannya pasar bebas ASEAN yang dengan sendirinya akan terjadi kompetisi yang sangat kuat terutama antar Negara ASEAN dalam merebut pasar kerja. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan akreditasi terhadap semua jenjang pendidikan mulai tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas maupun perguruan tinggi. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka meningkat kualitas lembaga pendidikan secara komprehensif yang tentunya juga akan melahirkan luaran yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa.

Jajat Burhanuddin ed. (2006) mengatakan bahwa proses “globalisasi” yang terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang millennium baru telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan: literatur akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. Lebih lanjut Jajat mengemukakan bahwa istilah globalisasi berarti perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan Negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia. Kondisi seperti ini tidak hanya menyentuh Negara-negara maju, tetapi juga Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Indonseia sebagai Negara cepat atau lambat akan berhadapan

dengan kondisi ini dengan persaingan global yang semakin tak terelakkan. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mendorong globalisasi menjadi bagian yang tak terelakkan. Menurut Jajat (2006) sejumlah perubahan struktural dan perkembangan akan mengalami dinamika antara lain:

Pertama, pertumbuhan yang sangat cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antara Negara yang pada dasarnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional (Multi-Nasional Corporations/ MNCs) yang terus semakin menguat.

Kedua, peningkatan utang dan ketergantungan Negara-negara berkembang –yang sebagian besarnya merupakan Negara-negara muslim- pada pasar keuangan internasional. Dimana utang Negara-negara berkembang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Ketiga, meningkatnya peranan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain dalam menentukan kebijakan dan program ekonomi, sosial dan politik Negara-negara berkembang. Hal merupakan kemerosotan kedaulatan Negara-negara berkembang karena harus tunduk terhadap kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga internasional tadi.

Keempat, pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dan nilai-nilai secara global dengan menciutkan jarak dan waktu. Dalam bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang ini tidak hanya mendorong terjadinya percepatan dalam perdagangan global, tetapi juga *knowledge-based-economy*. Tetapi hanya Negara-negara maju – penguasa teknologi komunikasi maju – yang menguasai *knowledge-based-economy* karena mereka memiliki berbagai fasilitas yang esensial bagi riset dan pengembangan dalam bidang ini. Karena itu *knowledge and technological gaps* semakin luas di antara negara-negara maju dan Negara-negara berkembang, sehingga kelompok negara-negara terakhir ini tidak dapat mengambil mamfaat dari globalisasi.

Kelima, berakhirnya perang dingin dan bankitnya demokrasi liberal. Pada sebagian Negara muslim lain yang sedang mengembangkan demokrasi -seperti Indonesia- tengah berlangsung “liberalisasi politik” yang gilirannya diikuti dengan “desentralisasi”, “otomisasi”, “devolusi” atau “dekonsentrasi”. Menurut Jajat lagi ada hal yang disayangkan bahwa Negara-negara berkembang tersebut menghadapi kesulitan-kesulitan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain untuk dapat menyelenggarakan program “desentralisasi” secara baik. Akibatnya, Negara-negara ini terus mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Apa yang diuraikan oleh Jajat di atas menggambarkan kepada kita betapa

Negara –negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dalam melakukan upaya pengembangan sumber daya manusianya. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang melakukan upaya –upaya untuk peningkatan sumber daya manusia, yaitu dengan desentralisasi dalam bidang pemertintahan termasuk pendidikan dengan memberikan kewenangan pemerintah daerah Tingkat I dan II untuk lebih aktif dan dominan dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Wacana tentang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia telah menjadi bahan diskusi yang para pakar sejak masa reformasi bergulir. Dengan semangat reformasi, maka lahirlah beberapa aturan dalam bentuk undang-undang sebagai acuan untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempirnaan terhadap sistem pendidikan yang telah ada. Di antaranya adalah undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Undang-undang atau aturan di atas yang merupakan produk hokum oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai pertanda bahwa pemerintah Indonesia ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Upaya tersebut dibuktikan diuatnya regulasi sebagai landasan hukum sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan reformasi khususnya di bidang pendidikan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menambah biaya untuk pendidikan dengan mengusulkan anggaran bidang pendidikan sampai 20o/o dari APBN meskipun target ini belum tercapai tetapi upaya tersebut sudah ada.

III. KESIMPULAN

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan maksimal secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha untuk membenahi lembaga-lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang semakin terampil dan lain sebagainya.

Upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif mulai tingkat pendidikan dasar, bahkan sebelumnya sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Salah satu diantaranya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan penyempurnaan di bidang kurikulum. Pemerintah dalam rangka menyeragamkan langkah dalam membenahan masalah pendidikan telah merumuskan konsep tentang kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Herry Widyastono (2014) mengatakan mutu lulusan, dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar mengajar, sedangkan mutu kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain input peserta didik, kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan, yang saling terkait satu sama lain.

Apa yang digambarkan Herry di atas dapat dipahami bahwa kemajuan pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa komponen dan sistem dalam menggerakannya semua potensi yang ada. Untuk memajukan kualitas pendidikan di tanah air kerjasama antara semua pihak yang telah dikemukakan di atas mutlak dilakukan. Pembinaan kurikulum yang komprehensif. Dan agar terjadi lagi setiap pergantian pemerintahan atau menteri selalu ada upaya untuk melakukan perubahan sistem pendidikan termasuk di dalamnya perubahan kurikulum dan masa belajar peserta didik. Sebagai dampak kebijakan pemerintahan yang hanya berlangsung lima sampai sepuluh tahun, maka sistem pendidikan di Indonesia selalu berubah setiap terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Hemat saya yang sangat mendesak untuk dilakukan penyempurnaan adalah pembinaan dari sistem dan unsur-unsur yang mendukung tercapainya kualitas pendidikan di tanah air seperti perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pembinaan kualitas sarana-prasarana pendukung dan lain-lain. Kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Apabila semua sistem dan factor-faktor pendukung dibenahi secara komprehensif, maka tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan di Indonesia untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi dengan lulusan perguruan tinggi di Negara lain akan teratasi. Sebab sampai hari ada kekhawatiran dan karaguan terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan di luar baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan dan kedisiplinan. Apabila kekhawatiran ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan di tanah air akan berdampak negatif. Bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi akan menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan di luar negeri. Kondisi ini akan berdampak pada banyaknya danah yang dikirim ke luar negeri untuk menyekolahkan anak.

Rendahnya kualitas lulusan lembaga pendidikan di tanah air akan berpengaruh pada keterserapan tenaga kerja, dampak selanjutnya akan banyak perusahaan dan rumah sakit di Indonesia memperjakan tenaga kerja asing sebagai karyawan, yang dengan sendirinya akan menciptakan pengangguran. Dan bangsa Indonesia akan menjadi penonton di rumah sendiri atau dikirim ke luar negeri hanya sebagai pembantu rumah tangga.

Demikianlah dampak negatif yang akan terjadi apabila pemerintah tidak segera melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap lembaga pendidikan untuk mengantisipasi persaingan global.

Jadi tidak ada jalan lain bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan dalam negeri dan dapat bersaing dengan tenaga kerja asing adalah melakukan pembenahan secara komprehensif dan sungguh-sungguh terhadap lembaga pendidikan di Indonesia dan faktor-faktor pendukungnya agar penyerapan tenaga dalam negeri dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang saat ini sudah menyerbu lapangan kerja di Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia harus keluar negeri mencari kehidupan, meskipun hanya menjadi pekerja kasar seperti tukang kebun di Malaysia, dan pembantu rumah tangga di Timur Tengah, sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan bangsa yang sangat besar dan Negara yang sangat subur dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan jumlah penduduk yang sangat besar. Semoga kondisi tersebut segera teratasi dengan upaya pemerintah melakukan reformasi di bidang pendidikan.

Dengan upaya-upaya di atas, maka bangsa Indonesia ke depan akan menjadi tuan di negeri sendiri, bahkan bisa menjadi tenaga ahli di Negara lain, semoga amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. *Kapita Selekta Pendidikan*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Profesi Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Widyastono, Herry. *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

